PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PETERONGAN

Jalan Kol. H. Ismasil Nomor 99 Tugusumberjo Telp. (0321) 861911
PETERONGAN

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN PETERONGAN

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018, terdiri dari:

a. Camat.
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
   2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Kehumasan.
c. Seksi Tata Pemerintahan.
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
e. Seksi Sosial Budaya
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Peterongan tersaji sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Peterongan

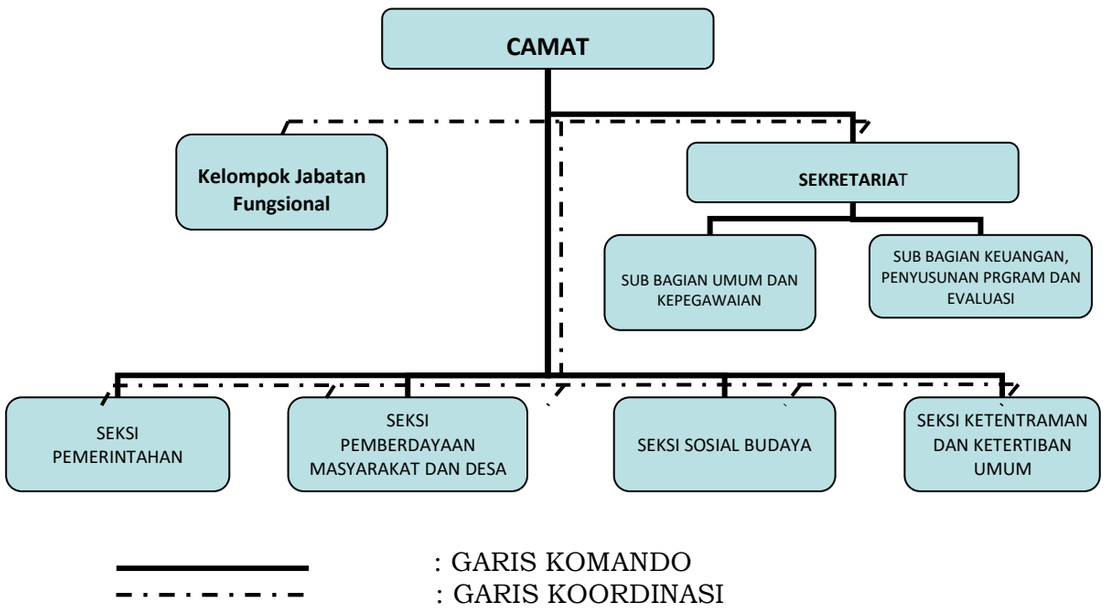

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Peterongan dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah,mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuanganz, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
e. Menghimpun data dan melaksanakan ketatausahaan barang;
f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;

g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi 4ertical di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi 4ertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan mayarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan 6ertic dan pemberdayaan perempuan;
f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
d. Melaksanakan penyelenggaraaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

   Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima *(service excelent)* harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai *"pelayanan masyarakat".*

   Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

   Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Peterongan juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

   Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan.

   Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Peterongan merupakan kawasan dengan tipologi pertanian dan Perkebunan menuju pengembangan wilayah Pariwisata. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja serta mendongkrak perekonomian lokal.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Peterongan menjadikan kebutuhan Kecamatan Peterongan belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Peterongan masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4.CASCADING

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 -2026 ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Peterongan.

Tujuan yang akan diwujudkan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.

Indikator Tujuan RPD ini adalah untuk mendukung sasaran RPD yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

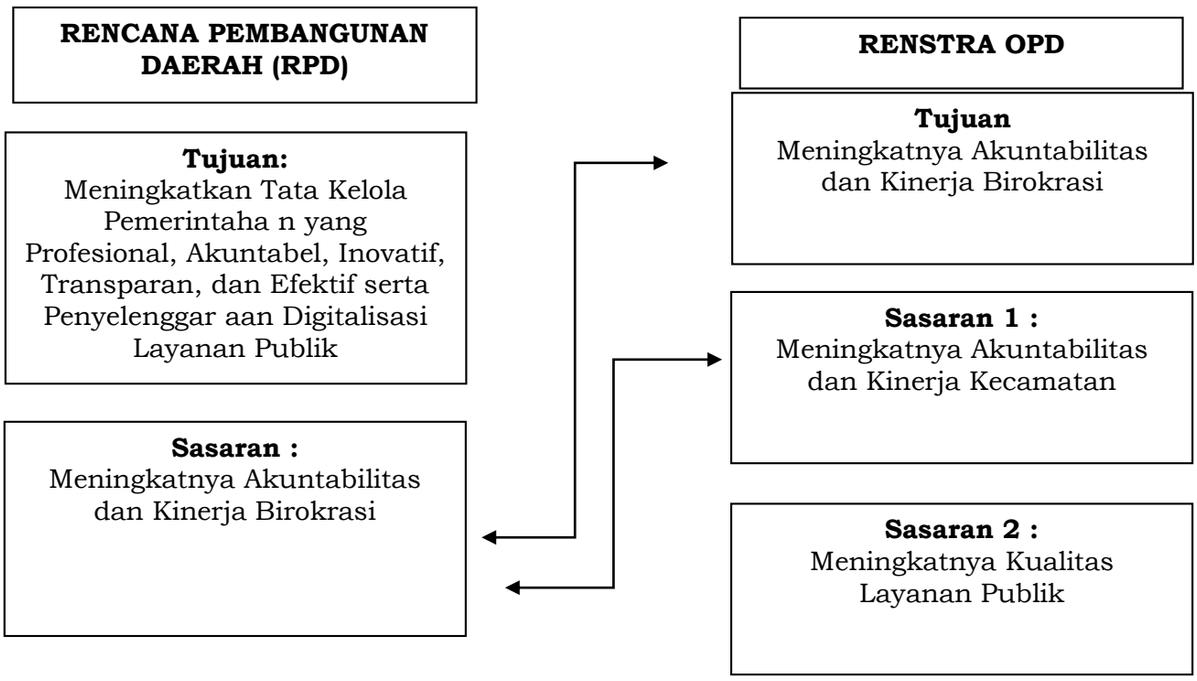

1.5. PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Peterongan telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Peterongan dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.

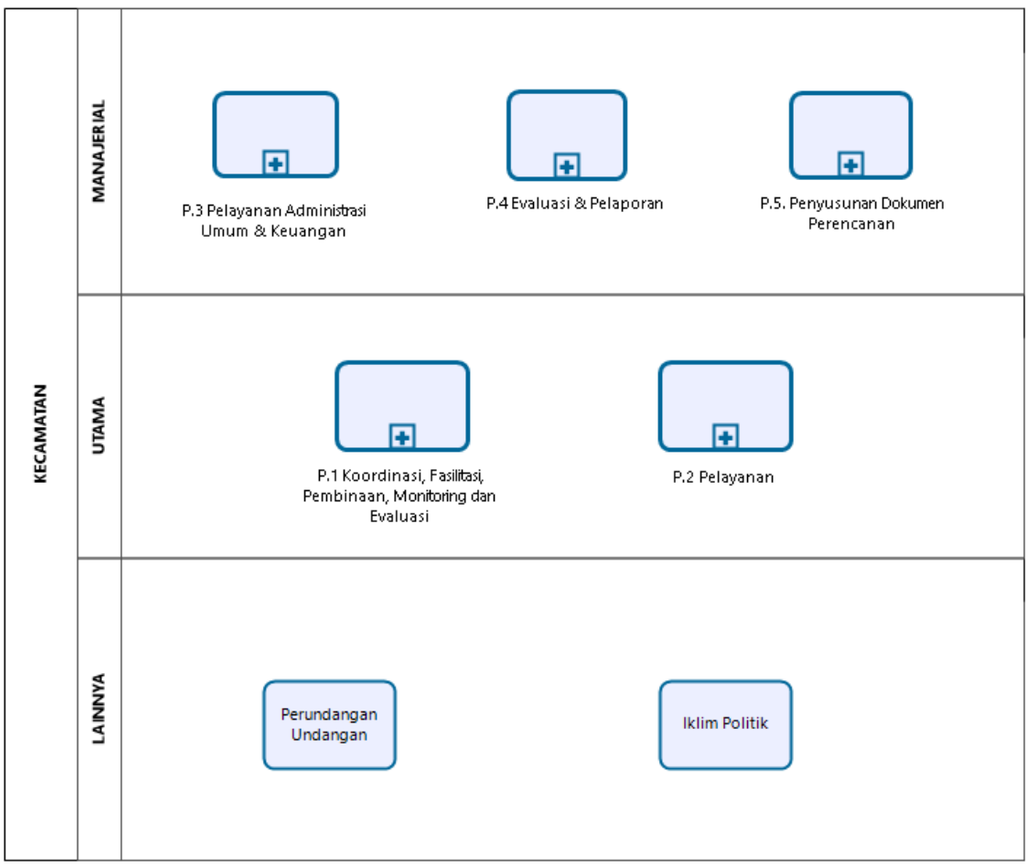

P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

1. **Manajerial**

   Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

   - *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain
   - *Evaluasi dan Pelaporan,* merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinnerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang diajalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

2. Core Utama
   - *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi,* merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tusi kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
   - *Pelayanan,* merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan
3. Core Lainnya
   - Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Peterongan, telah tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni 100,86%.

Meski demikian pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagaian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan periodesasi Renstra yang yang dimulai pada Tahun 2024 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2024-2026.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Peterongan untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target dan Nilai Sinergitas yang masih belum sesuai pada Tahun 2024.
2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Peterongan Tahun 2024-2026 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Peterongan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Rencana Progam dan Kegiatan Kecamatan Peterongan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

   Kegiatan:

   Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Subkegiatan:

   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Kegiatan:

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Subkegiatan:

   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Kegiatan:

   Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Subkegiatan:

   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanganPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Rencana Kinerja Kecamatan Peterongan pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Peterongan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Peterongan Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Kecamatan Peterongan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Peterongan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN PETERONGAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	100%	2.297.965.300	2.229.437.537
					Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	9.091.000	8.091.000
					Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.369.000	2.469.000
					2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.722.000	5.722.000
					Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	1.877.736.646	1.839.456.882
						2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %		
					Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1,815.071.646	1.776.791.882
					2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 dokumen	62.280.000	62.280.000

						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
					3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	385.000	385.000
					Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	94.187.500	94.198.000
					Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	15.958.900	15.958.900
					Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	53.240.000	53.240.000
					Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1.468.000	1.478.500
					4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	2.352.000
					5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	19.007.000	19.007.000
					6. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2.161.600	2.161.600
					Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	9.000.000	9.000.000

					penunjang urusan pemerintah Daerah				
					Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	9.000.000	9.000.000
					Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	244.024.195	216.724.695
					Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	78.720.000	66.720.000
					Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	165.304.195	150.004.695
					Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	39.716.960	19.928.510
					Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	19.928.510	19.928.510
					2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8.298.450	8.298.450
					3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	11.490.000	11.490.000

2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	IKM Kecamatan Peterongan	Nilai	87,00	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	79	**6.650.000**	**8.595.000**
					Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6.650.000	8.595.000
					Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.650.000	8.595.000
		IPP Kecamatan Peterongan	Nilai	3,38	Program :Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	**18.950.000**	**23.700.000**
						Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%		
					Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen	18.950.000	23.700.000
					Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desaa	28 dokumen	18.950.000	23.700.000
			Nilai	100%	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	**68.912.500**	**77.087.500**
						Persentase rekomendasi FORKOPIMCAM yang ditindaklanjuti			
					Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	23.350.000	26.775.000

					Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
						Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen	45.562.500	50.312.500
					Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	23.350.000	26.775.000
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	45.562.500	50.312.500
					Program : Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	**Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait**	**100%**	**781.600**	**781.600**
					Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	781.600	781.600
					Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	781.600	781.600
				100%	**Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	**100%**		

					Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga		
					Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				
					Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Peterongan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Peterongan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Peterongan tahun 2024 diperoleh dari pembandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penatapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Peterongan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Peterongan Tahun 2024

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	73	72,71	99,60
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	100%	100,00
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100,00
Kegiatan: Pengadaan bangunan gedung kantor	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor	100%	100%	100,00
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100,00
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	Nilai IKPP Kecamatan Peterongan	8,20	8,39	102,31
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	90	84,19	93,54
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100,00
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100,00
	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	28 Desa	29 Desa	28 Desa
	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	-

Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen
Rata-Rata Capaian				**101,82%**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ada beberapa yang memenuhi target. Sedangkan pada indikator ini, ditetapkan target kinerja sebesar 73,00, sementara realisasi yang dicapai adalah 72,71. Artinya, terdapat selisih sebesar 0,29 poin di bawah target. Jika dihitung secara persentase, capaian tersebut mencapai sekitar 99,60% dari target yang ditetapkan, yang menurut standar evaluasi umum tergolong dalam kategori "Baik" (antara 90–99,99%).

Realisasi yang hampir menyamai target menunjukkan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik dan mendekati ekspektasi. Gap atau selisih yang sangat kecil ini menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan yang tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan kecil untuk mencapai target secara penuh.

Meskipun telah hampir memenuhi target namun segala usaha Pencapaian Target dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Peterongan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN

1.	Melebihi/melampaui target	101,82%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Meskipun secara Indikator umum memenuhi target, sehingga secara individu dan Kegiatan sebagian besar telah memenuhi target, berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Pengukuran Kinerja	Realisasi Dan Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun se Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam suai aturan	100%	Realisasi dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja PD ---------- x 100% Target dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen ---------- x 100 % = 100% 2 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Realisasi pemenuhan administrasi keuangan PD ---------- x 100% Target pemenuhan administrasi keuangan PD	2 Dokumen ---------- x 100 % = 100% 2 Dokumen
		Tersusunnya laporan keuangan	Persentase laporan keuangan yang tersusun	100%	Realisasi laporan keuangan yang tersusun ---------- x 100% Target laporan keuangan yang tersusun	2 Dokumen ---------- x 100 % = 100% 2 Dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Realisasi pelayanan administrasi perkantoran ---------- x 100% Target pelayanan administrasi perkantoran	22 Layanan ---------- x 100 % = 100% 22 Layanan
4	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya gedung kantor	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor	100%	Realisasi pengadaan gedung kantor	370 m2 ---------- x 100 % = 100%

					---------- x 100% Target pengadaan gedung kantor	370 m2
5	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Realisasi pengadaan sarpras kantor ----------x 100% Target pengadaan sarpras kantor	2 unit ---------- x 100 % = 100% 2 unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Realisasi pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah ---------- x 100% Target pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100% ---------- x 100 % = 100% 100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya nilai guna sarana dan prasarana gedung kantor	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah sarpras yang terpelihara ----------x 100 % Jumlah target sarpras yang dipelihara	18 unit ---------- x 100 % = 100% 18 unit
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersedianya pelayanan PATEN	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah realisasi pelayanan PATEN yang sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah target pelayanan PATEN yang sesuai standar	100% ---------- x 100 % = 100% 100%
9.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	14 lembaga	Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina ---------- x 100 % Jumlah Target Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	14 lembaga ---------- x 100 % = 100% 14 lembaga

10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA ---------- x 100 % Jumlah Target Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan ---------- x 100 % = 100% 1 laporan
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam ---------- x 100 % Jumlah Target Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen ---------- x 100 % = 100% 4 dokumen
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa ---------- x 100 % Jumlah Target Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen ---------- x 100 % = 100% 28 dokumen

3.1.2.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peterongan

2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Peterongan

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian IKU
Tahun 2022, 2023 dan 2024

Sasaran Strategis, Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	73,00	72,52	72,17	72,71
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan Peterongan	83,46	89,28	98,44	99,66
	2.Nilai IPP Kecamatan Peterongan	3,10	3,28	3,25	3,41
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Peterongan	8,20	7,74	8,17	8,39
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	90	83,27	91,64	84,19
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%
	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	100%	100%

	Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa secara umum capaian indikator kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat di identfikasi sebagai berikut. Untuk tahun 2022, 2023 Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diukur karena sama target dan indikatornya yaitu Nilai IKM dan Nilai IPP Kecamatan Peterongan. Sedangkan untuk tahun 2024 target dan Indikator Kinerja Utamanya berbeda yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Peterongan

Untuk analisis pencapaian pengukuran kinerja masing-masing kegiatan selama tahun 2022, 2023, 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2022		%	2023		%	2024		%
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
4.	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	n/a	n/a	n/a
5.	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Nilai	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
9.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa	Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	100	28 Dokumen	28 Dokumen	100	28 Dokumen	28 Dokumen	100

	Masyarakat Desa dan Kelurahan	/Perubahan APB Desa yang tepat waktu										
		Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	100	14 Lembaga	14 Lembaga	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Desa	14 Desa	100
10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 laporan	5 laporan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	n/a
12.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	12 kegiatan	100
12.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	laporan	28 Laporan	28 Laporan	100	28 Laporan	28 Laporan	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	14 Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Desa	14 Desa	100
		RATA RATA CAPAIAN SELURUH KEGIATAN	N/A			100			100			100

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target target jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
Pada Dokumen Renstra

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	73,00	72,71	99,60
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Peterongan	8,20	8,39	102,31
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	90,00	84,19	0,93
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100,00
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100,00
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00
Program: Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100,00
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100,00

Dari tabel tersebut Realisasi yang hampir menyamai target menunjukkan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik dan mendekati ekspektasi. Gap atau selisih yang sangat kecil ini menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan yang tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan kecil untuk mencapai target secara penuh.

Beberapa kemungkinan penyebab tidak tercapainya target secara penuh, meskipun sangat dekat, antara lain:

1. Faktor Teknis atau Operasional:
   Kemungkinan terjadi keterlambatan atau hambatan teknis minor pada pelaksanaan kegiatan, seperti waktu pelaksanaan yang sedikit molor atau proses administrasi yang belum selesai pada saat pengumpulan data realisasi.
2. Kondisi Lapangan yang Dinamis:
   Perubahan kondisi eksternal atau kebijakan yang mendadak bisa saja sedikit memengaruhi hasil akhir, meskipun dampaknya tidak signifikan secara keseluruhan.
3. Akurasi Data dan Pelaporan:
   Dalam beberapa kasus, angka realisasi bisa saja sedikit tertahan akibat proses validasi data yang belum final sepenuhnya saat batas waktu pelaporan.

Pada indikator ini, ditetapkan target kinerja sebesar **73,00**, sementara realisasi yang dicapai adalah **72,71**. Artinya, terdapat selisih sebesar **0,29 poin** di bawah target. Jika dihitung secara persentase, capaian tersebut mencapai sekitar **99,60% dari target yang ditetapkan**, yang menurut standar evaluasi umum tergolong dalam kategori "**Baik**" (antara 90–99,99%).

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/internasional.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi SAKIP, IPP dan IKM Kec. Peterongan dengan Skala Nasional

Uraian	Realisasi Kecamatan Peterongan	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional
Nilai SAKIP	72,71	64,23	113,2%
Nilai IKPP	8,39	7,31	114,7%

Sumber: - Paparan Ketua KSAN, Prof Agus Pramusinto dan Paparan Deputi bid. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Peterongan tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 Standart Nasional nilainya sudah melebihi dengan rincian pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Kecamatan 72,71 (BB) sedangkan nilai SAKIP

Nasional 64,23 ada selisih kurang sekitar 8,48 poin. Untuk capaian nilai IKPP Kecamatan Peterongan Tahun 2024 dengan nilai 8,39 sedangkan Nilai IKPP rata rata Nasional pada Tahun 2023 sebesar 7,31 dengan selisih kurang sebesar 1, 08 poin.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Peterongan dalam aspek akuntabilitas dan pelayanan publik berada di atas rata-rata nasional, dengan:

- Nilai SAKIP mencapai 113,2% dari capaian nasional, dan
- Nilai IKPP mencapai 114,7% dari capaian nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Peterongan telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Rekomendasi yang bias dilakukan

1. Mempertahankan praktik baik (best practices) yang telah berjalan, terutama dalam hal pengelolaan kinerja dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan evaluasi internal agar capaian dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
3. Melakukan replikasi pendekatan dan strategi yang berhasil pada sektor atau unit pelayanan lain yang belum mencapai standar serupa.
4. Menggunakan data ini sebagai modal advokasi dalam pengusulan program, anggaran, dan perbaikan sistem kelembagaan ke depan.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Kabupaten Jombang.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi SAKIP, IKPP Kecamatan Peterongan dengan Tingkat Kabupaten

Uraian	Realisasi Kec Peterongan	Realisasi Tingkat Kabupaten	% Perbandingan dengan tingkat Kabupaten
Nilai SAKIP	72,71	72,33	100,5%
Nilai IKPP	8,39	8,45	0.99%

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Peterongan tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Kabupaten Jombang untuk indicator Nilai SAKIP, nilainya sudah melebihi dengan

prosentase perbandingan 100,5% dengan rincian pada tahun 2024 Nilai SAKIP Kecamatan Peterongan 72,71 (BB) sedangkan nilai SAKIP Kabupaten 72,33 (BB) ada selisih kurang sekitar 0,38 Poin. Untuk capaian nilai IKPP Kecamatan Peterongan Tahun 2024 sebesar 8,39 sedangkan Nilai IKPP rata rata Kabupaten Jombang sebesar 8,45 dengan selisih kurang sebesar -0,06 poin.

Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level instansi sejenis

Tabel 3.9

Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis

Uraian	Realisasi Kecamatan Bareng	Realisasi Kecamatan Peterongan	% Perbandingan Realisasi kinerja
Nilai SAKIP	73,59	72,71	0.98%
Nilai IKPP	8,16	8,39	102,8%
Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	1
Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	1
Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	1

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja.

Pada tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan 5 (lima) indikator yang pertama Nilai SAKIP belum memenuhi Target dari target yang ditetapkan 73,00 terealisasi 72,71 dengan Capaian 99,60%. Untuk Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu nilai IKPP Kecamatan Peterongan sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 8,29 dimana terealisasi 8,39 dengan persentase capaian 102,31%. Sedangkan untuk indikator kinerja Utama yang ketiga, empat dan lima masing-masing telah memenuhi target yakni sebesar 100%

Total Rata-rata Capaian 5 (lima) IKU tersebut di tahun 2024 adalah 100,38%

Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
c. Dukungan dan komitmen Camat Peterongan, Lintas Sektor Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Peterongan untuk mencapai tujuan organisasi.

Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai yang mempengaruhi terhadap kurangnya budaya Kinerja dalam mewujudkan dan meningkatkan nilai Sistem akuntabilitasi Kinerja (SAKIP) .
d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewewang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah relevan di karenakan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah diserahkan kewenangannya pada

Kecamatan serta memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Peterongan tersaji dalam tabel berikut ini:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Peterongan Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program dan 13 kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Peterongan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.403.150.837,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.214.850.373,00 atau serapan dana APBD mencapai 92,16% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa

Tabel 3.10
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Peterongan Tahun 2024

NO	Kategori	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1.	Telah memenuhi Target	2	**100,38**%	Rp. 2.214.850.373,00	92,16%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah efektif secara Indikator Per Kegiatan hal tersebut dikarenakan penetapan target pada IKU sudah sesuai, Sedangkan penyerapan anggaran kinerja sebesar 92,16% telah menghasilkan kinerja yang sangat baik dari target sebelumnya namun secara indicator Per Kegiatan sudah memenuhi target dari penyerapan anggaran kinerja sebesar 92,16% telah menghasilkan kinerja yang lebih dari target sebesar 100,38% jadi terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,91%.

TABEL 3.11
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN PETERONGAN TAHUN 2024

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	73,00	72,71	99,60	2.229.437.537	2.041.137.873	91,55
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00	2.229.437.537	2.041.137.873	91,55
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00	8.191.000	8.191.000	100,00
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100,00	1.839.456.882	1.666.948.153	90,62
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100,00			
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Peterongan	100%	100%	100,00	9.000.000	9.000.000	100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,00	94.198.000	81.948.600	87,00
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100,00	22.150.000	22.150.000	100,00

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100,00	216.724.695	216.499.470	99,90
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100,00	39.716.960	36.400.650	91,65
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	Nilai IKPP Kecamatan Peterongan	8,20	8,39	102,32	173.713.300	173.712.500	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	90,00	84,19	93,54	8.595.000	8.595.000	99,94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Paten Kecamatan	100%	100%	100,00	8.595.000	8.595.000	99,94
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100,00	77.087.500	77.087.500	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 Lembaga	28 Lembaga	100,00	77.087.500	77.087.500	100,00
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	14 Desa	14 Desa	100,00			
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100,00	77.087.500	77.087.500	100,00
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00			

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100,00	26.775.000	26.775.000	100,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100,00	50.312.500	50.312.500	100,00
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100,00	14.634.000	14.634.000	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100,00	14.634.000	14.634.000	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100,00	23.700.000	23.700.000	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	14 Desa	14 Desa	100,00	23.700.000	23.700.000	100,00
					2.403.150.837	**2.214.850.373**	**92,16**

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Peterongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023 Kecamatan Peterongan yakni: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Peterongan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Peterongan langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

d. Transparan

   Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

e. Responsif

   Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

f. Efisien

   Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

g. Efektif

   Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

h. Akuntabel

   Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

i. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Peterongan melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	99,60	91,55	8,05
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	91,55	8,45
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100,00	100,00	
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100,00	90,62	9,38
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100,00		
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Peterongan	100,00	100,00	-
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	87,00	13,00
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100,00	100,00	-
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	99,90	0,10
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100,00	91,65	8,35
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	Nilai IKPP Kecamatan Peterongan	102,32	100,00	2,32

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	93,54	99,94	- 6,40
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Paten Kecamatan	100,00	99,94	0,06
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100,00	100,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100,00	100,00	-
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	100,00		
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00	100,00	-
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00		
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00	100,00	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	100,00	100,00	-
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100,00	100,0	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	100,00	100,00	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100,00	100,00	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	100,00	100,00	-
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BERDASARKAN REALISASI PER KEGIATAN		**100,00**	**97,62**	**2,38**
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BERDASARKAN REALISASI IKU		**100,96**	**95,78**	**5,18**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 100,96% dengan menggunakan anggaran sebesar 95,78% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,18% (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	73,00	72,71	99,60	9	6	66,67	32,94
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00				33,33
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	Nilai IKPP Kecamatan Peterongan	8,20	8,39	102,32	5	1	20,00	82,32
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	90,00	84,19	93,54	4	1	25,00	73,54
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100,00	2	1	50,00	75,00
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100,00	2	1	50,00	50,00

	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100,00				50,00
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100,00	4	1	25,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100,00	2	1	50,00	50,00
RATA-RATA CAPAIAN IKU				**99,48**	**RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM**		**42,33**	**60,79**

Dari tabel 3.1.3 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 60,79 dimana dari 24 anjab ABK Kecamatan Peterongan ketersediaan SDM adalah 11 dengan persentase ketersediaan 42,33% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 99,48%.

Tabel 3.1.4
Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	1	_
2	Portable Generating Set	1	1	_
3	Station Wagon	1	1	_
4	Sepeda Motor	9	9	_
5	Sepeda Motor (Kades)	14	14	_
6	Lemari Besi/Metal	4	4	_
7	Lemari Kayu	12	12	_
8	Rak Besi	3	3	_
9	Rak Kayu	2	2	_
10	Filing Cabinet Besi	2	2	_
11	CCTV - Camera Control Television System	1	1	_
12	White Board	3	3	_
13	Mesin Absensi	2	2	_
14	LCD Projector/Infocus	2	2	_
15	Papan Visual/Papan Nama	1	1	_
16	Papan Pengumuman	1	1	_
17	Meja Kerja Kayu	1	1	_
18	Sice	4	4	_
19	Meja Rapat	5	5	_
20	Tempat Tidur Kayu	1	1	_
21	Meja Podium	1	1	_
22	Meja Panjang	2	2	_
23	Meja 1/2 Biro	8	8	_
24	Sketsel	2	2	_
25	Kursi Rapat (Besi)	35	35	_
26	Kursi Rapat (Plastik)	130	130	_
27	Kursi Tamu (3 dudukan)	3	3	_
28	Kursi Putar	5	5	_
29	Kursi Biasa (Besi)	50	50	_
30	Kursi Biasa	4	4	_

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	TINGKAT EFISIENSI
31	Bangku Tunggu (4 dudukan)	3	3	_
32	Kursi Lipat	20	20	_
33	Sofa	3	3	_
34	Meubeleur lainnya	3	3	_
35	Jam Elektronik	1	1	_
36	Lemari Es	1	1	_
37	A.C. Split	11	11	_
38	Kipas Angin	6	6	_
39	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	_
40	Televisi	6	6	_
41	Sound System	3	3	_
42	Stabilisator	1	1	_
43	Gordyin/Kray	1	2	_
44	Pompa Kebakaran/Portable	2	2	_
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	_
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	_
47	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	2	_
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	_
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	_
50	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	8	8	_
51	Telephone Hybrid	1	1	_
52	Camera Electronic	2	2	_
53	Layar Film/Projector	1	1	_
54	Wireless Amplifie	1	1	_
55	Kursi Dorong	1	1	_
56	recorder display lainnya (dst)	4	4	_
57	P.C Unit	7	7	_
58	Lap Top	7	9	7,78
59	Note Book	1	1	_
60	CPU (Peralatan Mainframe)	3	3	_
61	Monitor	2	2	_
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	14	92,86
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	_
64	Peralatan Komputer lainnya	1	1	_
65	Mesin Potong Rumput	1	1	_
	TOTAL SARPRAS	**434**	**438**	
	RATA-RATA EFISIENSI			**85,3**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2024 terdapat 434 sarana dan prasarana di Kecamatan Peterongan sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 438 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 85,3%.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Meningkatnya kualitas layanan publik**, Kecamatan Peterongan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI	Menunjang /Kurang	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Nilai SAKIP	73,00	2.229.437.537	2.041.137.873		91,55
Program: Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.229.437.537	2.041.137.873		91,55
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	8.191.000	8.191.000		100,00
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	1.839.456.882	1.666.948.153		90,62

	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%				
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Peterongan	100%	9.000.000	9.000.000		100,00
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	94.198.000	81.948.600		87,00
Kegiatan :Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	22.150.000	22.150.000		100,00
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	216.724.695	216.499.470		99,90
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	39.716.960	36.400.650		91,65
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan Publik	Nilai IKPP Kecamatan Peterongan	8,20	173.713.300	173.712.500		100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	90,00	8.595.000	8.595.000		99,94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Paten Kecamatan	100%	8.595.000	8.595.000		99,94
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	77.087.500	77.087.500		100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan	28 Lembaga	77.087.500	77.087.500		100,00

	Masyarakat Desa yang dibina					
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	14 Desa				
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	77.087.500	77.087.500		100,00
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%				
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	26.775.000	26.775.000		100,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	50.312.500	50.312.500		100,00
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	14.634.000	14.634.000		100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	14.634.000	14.634.000		100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	23.700.000	23.700.000		100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	14 Desa	23.700.000	23.700.000		100,00

Pemerintahan Desa						
			2.403.150.837	**2.214.850.373**		**92,16**

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

3.3.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

Nilai SAKIP Kecamatan Peterongan pada tahun 2024 Berdasarkan LHE dari Tim Evaluasi Kabupaten nomor X.700/554/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 **dengan nilai sebesar 72,71 dengan kategori (BB) Sangat Baik** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)
a	Perencanaan Kinerja	30 %	26,60	19,02	25,08	83,60%
b	Pengukuran Kinerja	30 %	24,32	11,67	21,79	72,63%
c	Pelaporan Kinerja	15 %	8,18	6,30	7,8	52,00%
d	Evaluasi Kinerja	25%	18,03		18,03	72,12%
		100%			**72,71**	

Dalam poin a s/d d menyajikan dapat di simpulkan bahwa :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
   a. didapati Surat Keputusan Camat Nomor : 188/415.64/2024 tentang Reward and Punishment di Lingkungan Kecamatan Peterongan, namun didalamnya belum didapati adanya kriteria rinci untuk pemberian reward and punishment, serta belum menetapkan pegawai yang mendapatkan reward maupun punishment
   b. belum adanya pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam pencapaian tujuan organisasi.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
   Hasil Evaluasi lapangan diketahui bahwa hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pada periode berikutnya, dan juga dalam pengukuran kinerja indvidu belum mempertimbangkan capaian kinerja organisasi
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
   Belum seluruh upaya nyata atas capaian kinerjamenyajikan hambatan/permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian target.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
   Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklnajuti, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
   .

Rekomendasi/saran dari Tim evaluasi SAKIP Kabupaten yang Utama dan penting untuk di tindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi pada Surat Keputusan Camat Nomor : 188/415.64/2024 tentang Reward and Punishment di Lingkungan Kecamatan Peterongan dengan menambahkan kriteria rinci untuk pemberian reward and punishment.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indicator kinerja hingga penetapan target organisasi.
3. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mmepertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
4. Menyajikan seluruh upaya nyata yang mendukung hambatan/permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian target
5. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.

3.3.2 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Peterongan pada tahun 2024 Berdasarkan LHE dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nomor 000.8.6/10019/415.10/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebesar **76,85** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	**Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**10%**	**6,47**
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2 %	1,50
	Rencana Aksi	4 %	2,67

	Monitoring dan Evaluasi	4 %	2,31
2.	**Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**90%**	**70,37**
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50 %	39,39
	Budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40 %	30,98
Indeks Reformasi Birokrasi		**100%**	**76,85**

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanakan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

a. Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah :
   - Belum terlihat kontribusi Agen Perubahan terhadap Perubahan pada unit kerja.
   - Kualitas rencana aksi masih belum optimal, beberapa rencana aksi masih berfokus hanya pada pemenuhan dokumen
   - Kurangnya optimalnya proses Monev Internal dalam mengawal dan memastikan kualitas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RB dalam rangka memaksimalkan capaian pembangunan RB

a. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru
   - Tim kerja yang telah dibentuk belum mencerminkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, MPH yang disajikan adalah MPH Perangkat Daerah dan bukan merupakan MPH Tim Kerja

b. Tingkat Pembangunan ZI
   - Telah melaksanakan pembangunan pada 6 area perubahan Zona Integritas namun belum berjalan minimal 1 tahun

c. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
   - Kualitas tindak lanjut aduan kurang baik dan kurang responsif

d. Indeks Pengelolaan Aset
   - Untuk Indikator Persentase Ketepatan Perencanaan Dengan Realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan riil Aset/BMD yang

akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah. Sebagai contoh jika membutuhkan 5 Lap top maka di RKBMD juga tertulis pengadaan 5 Lap top RKA sampai dengan riil barang yang dibeli sama. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Atau contoh kasus lain tidak tercantum dalam RKBMD, tetapi dicantumkan dalam RKA sehingga hal ini juga mengurangi nilai. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah RKMD dan RKA sudah sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sesuai, hal ini juga dapat mengurangi nilai Jadi dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Dilihat dari sisi pemeliharaan juga harus diperhatikan. Yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharaannya.

- Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini adalah batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik.
- Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Hal ini berkaitan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang dituangkan di dalam TOR/KAK dengan harapan adalah tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga dengan berakhirnya tahun anggaran

diharapkan proses input data dalam aplikasi BMD juga selesai. Adapun data pembandingnya merupakan data realisasi anggaran per 31 Desember pada masing-masing perangkat daerah.

e. Indeks Profesionalitas ASN

- Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi karena masih 28.85 dari Nilai Kompetensi maks 40. Dimensi Kinerja 23.64 dari Nilai Kinerja maks 30

f. Tingkat Internalisasi Core Value ASN

- Telah dilaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN melalui sosialisasi dan penggunaan media interaktif namun belum dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kecamatan Peterongan, rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru
    - Segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN
2. Nilai SAKIP
    - Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024
3. Tingkat Pembangunan ZI
    - Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutaan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahanpermasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4. Maturitas SPIP
    - Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan

lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern

5. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
    - Monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindak lanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
6. Indeks Pengawasan Kearsipan
    - Unit Pengolah agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan.
    - Seluruh arsip aktif yang disimpan oleh Unit Pengolah agar dibuatkan daftar arsip aktif
    - Pembuatan Daftar arsip inaktif yang dipindahkan pada Unit Pengolah agar ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja sebagai pihak yang memindahkan dan unit kearsipan sebagai pihak yang menerima.
    - Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis
    - Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center
7. Indeks Profesionalitas ASN
    - Agar capaian kinerja organisasi ditingkatkan supaya bisa mendapatkan predikat Istimewa dan nilai kinerja juga bisa maksimal
8. Tingkat Internalisasi Core Value ASN
    - Melanjutkan upaya internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas

BAB IV
PENUTUP

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Peterongan berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026Kecamatan Peterongan .

Laporan kinerja Kecamatan Peterongan Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Peterongan.

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Peeterongan secara keseluruhan dan IKU yang Kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan, Telah tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni 100,38%.

Meski Demikian Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagaian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan periodesasi Renstra yang yang dimulai pada Tahun 2024 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2024-2016.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Peterongan untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Organisasi dalam Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih belum sesuai pada Tahun 2024.
2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Peterongan Tahun 2024-2026 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Peterongan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan..

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Peterongan diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Peterongan kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Peterongan, 31 Januari 2025

CAMAT PETERONGAN

MOH. ERYK ARIF,S.STP,M.M